LAPORAN IMPLEMENTASI REKOGNISI PROGRAM STUDI

PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM

Peran Kesultanan Cirebon dalam Perkembangan Islam dan Pembentukan Peradaban Islam di Nusantara

Program Studi Sejarah Peradaban Islam

Fakultas Ushuluddin dan Adab

Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah

Bersama Kasultanan Kacirebonan Cirebon

LEMBAR IDENTITAS REKOGNISI

Program Studi	Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ushuluddin dan Adab, UII Dalwa
Mitra	Kasultanan Kacirebonan Cirebon
Bentuk rekognisi yang diusulkan	Mitra Akademik Pengembangan Kuliah Umum Sejarah Peradaban Islam
Tema	Peran Kesultanan Cirebon dalam Perkembangan Islam dan Pembentukan Peradaban Islam di Nusantara
Dasar Kerja Sama	Nota Kesepahaman Program Studi Sejarah Peradaban Islam UII Dalwa dan Kasultanan Kacirebonan tanggal 4 September 2026, khususnya Pasal 3 mengenai kuliah umum bersama
Tanggal dan lokasi pelaksanaan	13 Oktober 2025

Lembar identitas ini disediakan untuk penelusuran dokumen secara sistematis. Seluruh data mengenai pelaksanaan, peserta, narasumber, dan keluaran wajib diperiksa melalui arsip aktual sebelum laporan diubah menjadi naskah final.

DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTITAS REKOGNISI 2
DAFTAR ISI 3
BAB I — PENDAHULUAN 4
1.1 Latar Belakang 4
1.2 Tujuan dan Relevansi Rekognisi 5
BAB II PELAKSANAAN IMPLEMENTASI 8
2.1 Perencanaan dan Persiapan 8
2.2 Pelaksanaan Substantif 9
2.3 Dokumentasi dan Pengendalian Evidence 11
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN 13
3.1 Hasil Akademik 13
3.2 Manfaat bagi Program Studi 14
3.3 Keterlacakan Evidence dan Status Luaran 15
BAB IV MONITORING, EVALUASI, DAN TINDAK LANJUT 17
4.1 Monitoring dan Evaluasi 17
4.2 Rencana Tindak Lanjut 18
BAB V PENUTUP 20
5.1 Kesimpulan 20

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejarah peradaban Islam di Cirebon merupakan suatu ruang kajian yang memperlihatkan hubungan berlapis antara proses penyebaran agama, pembentukan pusat-pusat kekuasaan, perkembangan masyarakat pesisir, dan perubahan tradisi kebudayaan. Sejarah kawasan ini tidak cukup dibaca sebagai rangkaian tokoh serta penanggalan peristiwa, karena proses historis yang membentuknya berlangsung melalui perjumpaan sosial, mobilitas manusia, dan negosiasi nilai di berbagai lingkungan masyarakat. Pembacaan yang lebih terarah dibutuhkan agar penjelasan tentang peradaban Islam tidak terputus dari konteks perubahan sosial dan sumber sejarah yang menyertainya.

Dalam perspektif pendidikan tinggi, pembelajaran sejarah perlu memperlihatkan bagaimana suatu pernyataan akademik dibangun dari pembacaan sumber, analisis konteks, serta keterbukaan terhadap kritik. Paparan yang hanya mengulang kisah terkenal tanpa menimbang jenis dan asal sumber berisiko menjadikan sejarah sebagai kumpulan pengetahuan yang tidak dapat diuji. Oleh karena itu, kuliah umum dapat dirancang untuk menunjukkan kerja historiografi dalam bentuk yang mudah diikuti mahasiswa, tanpa menghilangkan ketelitian ilmiah yang menjadi prinsip penting pendidikan sejarah.

Kasultanan Kacirebonan Cirebon memiliki keterkaitan kelembagaan dengan tema tersebut sebagai pihak yang dapat memberikan sudut pandang mengenai tradisi, ingatan sejarah, dan warisan kesultanan menurut batas kewenangannya. Perguruan tinggi, pada sisi yang berbeda, memiliki peran dalam menata pertanyaan penelitian dan memberikan kerangka akademik bagi proses interpretasi. Pertemuan kedua perspektif ini berpotensi menjadi ruang pembelajaran yang produktif apabila dilandasi penghormatan terhadap sumber, keterbukaan terhadap perbedaan penafsiran, dan kesepakatan mengenai penggunaan bahan dokumentasi.

Nota Kesepahaman tanggal 4 September 2025 antara Prodi SPI UII Dalwa dan Kasultanan Kacirebonan mencantumkan penyelenggaraan kuliah umum sebagai salah satu bentuk kerja sama akademik. Ketentuan tersebut menjadi dasar yang tepat untuk merumuskan suatu kegiatan dengan tema peranan Kesultanan Cirebon dalam perkembangan Islam dan pembentukan peradaban Islam Nusantara. Akan tetapi, MoU merupakan kesepahaman umum; rincian pelaksanaan, penugasan narasumber, serta pemberian pengakuan akademik tetap memerlukan dokumen lanjutan dan bukti yang dapat diperiksa.

Kuliah umum memiliki karakter yang berbeda dari seminar. Dalam kuliah umum, satu paparan utama dapat diperdalam melalui pertanyaan mahasiswa dan pembahasan dosen, dengan penekanan pada proses transfer pengetahuan yang bertanggung jawab. Pengaturan demikian

memungkinkan narasumber menghadirkan alur penjelasan yang utuh, sementara peserta mempunyai kesempatan menempatkan informasi yang diperoleh dalam kerangka teori dan metode studi sejarah.

Penyusunan laporan implementasi diperlukan agar semua tahapan kerja sama dapat dihubungkan satu sama lain, sejak alasan akademik dan perencanaan sampai dokumentasi serta evaluasi hasil. Pada tahap ini, laporan disusun sebagai draf kerangka sebelum ketersediaan dokumen pelaksanaan dikonfirmasi. Karena itu, uraian mengenai materi, dampak pembelajaran, maupun rekognisi dibingkai sebagai sasaran yang perlu dibuktikan, bukan sebagai capaian yang telah terwujud.

Pembahasan mengenai Kesultanan Cirebon tidak semata menyangkut proses pergantian kekuasaan. Sejarah lembaga politik Islam juga terkait dengan perkembangan jaringan keagamaan, pertukaran gagasan, perubahan bahasa simbolik, serta tata hubungan masyarakat pesisir dan pedalaman. Bagi program studi, konteks tersebut membuka kesempatan mempertemukan pendekatan sejarah politik, sosial, dan kebudayaan dalam satu pembacaan yang saling menunjang. Kuliah umum menjadi ruang yang memungkinkan hubungan antardimensi itu dijelaskan secara utuh tanpa harus menghilangkan kekhasan masing-masing sumber.

Kebutuhan terhadap forum semacam ini juga dipengaruhi oleh berkembangnya informasi sejarah di ruang publik. Narasi yang disebarkan melalui berbagai medium sering kali lebih cepat menjangkau masyarakat dibandingkan kajian ilmiah yang melalui pemeriksaan sumber. Kondisi tersebut menuntut perguruan tinggi menguatkan literasi historiografi, yaitu kemampuan menilai perbedaan antara ingatan kolektif, tradisi lisan, sumber tertulis, dan interpretasi akademik. Melalui kuliah umum, mahasiswa dapat mengamati secara langsung bagaimana narasumber menyajikan keterangan, menggunakan rujukan, serta menjawab pertanyaan tentang dasar sebuah kesimpulan.

Program Studi Sejarah Peradaban Islam memerlukan pengalaman akademik yang tidak terbatas pada penyampaian materi reguler di kelas. Perjumpaan dengan pihak yang memahami tradisi kelembagaan kesultanan berpotensi menghadirkan contoh kasus yang memperkaya pertanyaan riset mahasiswa. Akan tetapi, akses terhadap keterangan dan koleksi sejarah harus dilakukan melalui izin yang sesuai. Hubungan akademik yang baik justru dibangun melalui penghormatan terhadap sumber, kewenangan narasumber, dan kejelasan penggunaan hasil kegiatan.

1.2 Tujuan dan Relevansi Rekognisi

Tujuan utama kuliah umum adalah membangun pemahaman akademik yang lebih utuh mengenai kedudukan Kesultanan Cirebon dalam dinamika perkembangan Islam di Nusantara. Pemahaman tersebut perlu mencakup dimensi kronologi dan proses, sehingga mahasiswa mampu menghubungkan pengalaman lokal dengan pergerakan yang lebih luas dalam sejarah masyarakat Islam. Dengan cara itu, Cirebon tidak diperlakukan sekadar contoh yang berdiri sendiri, tetapi sebagai konteks yang dapat digunakan untuk mendalami pertanyaan historis tentang kekuasaan, dakwah, dan kebudayaan.

Tujuan berikutnya adalah membuka ruang dialog antara pengetahuan kelembagaan yang dimiliki mitra dan pendekatan akademik yang dikembangkan Prodi SPI. Dialog demikian dapat membantu mahasiswa membedakan kesaksian tradisi, penjelasan berbasis arsip,

temuan penelitian, dan kesimpulan interpretatif. Perbedaan bentuk pengetahuan perlu dijelaskan agar penghormatan kepada tradisi tidak menghilangkan kebutuhan akan verifikasi historis dan agar pendekatan akademik tidak mengabaikan konteks masyarakat yang memelihara warisan kebudayaan.

Dari sisi kompetensi mahasiswa, kuliah umum ditujukan untuk melatih kemampuan menyimak paparan ilmiah, mencatat pokok argumen, mengajukan pertanyaan kritis, dan menyusun refleksi berbasis sumber. Hasil belajar seperti ini menjadi lebih bermakna apabila materi kuliah umum dikaitkan dengan tugas dalam mata kuliah terkait, misalnya historiografi Islam, sejarah Islam Nusantara, atau metodologi penelitian sejarah. Keterkaitan tersebut dirancang sejak awal, bukan disimpulkan secara otomatis dari keberadaan kegiatan.

Bagi program studi, pelibatan mitra eksternal dapat memperluas ruang pengenalan sumber dan praktik kesejarahan. Kegiatan semacam ini juga dapat menjadi tempat mengidentifikasi topik penelitian lanjutan, tetapi pengembangan agenda penelitian tetap harus dilaksanakan melalui kesepakatan dan prosedur yang sesuai, terutama bila diperlukan akses arsip atau wawancara dengan pihak tertentu.

Relevansi dengan rekognisi bergantung pada sifat kontribusi yang benar-benar dipercayakan kepada program studi. Jika Kasultanan secara resmi mengakui kemampuan Prodi SPI dalam merumuskan bahan akademik, menyediakan pembahas, atau mendampingi kegiatan ilmiah, pengakuan tersebut dapat menjadi bukti eksternal mengenai kepercayaan pada kepakaran program studi. Namun peran sebagai penyelenggara bersama tidak otomatis setara dengan pengakuan akademik, sehingga kategorinya harus dinilai hati-hati.

Karena itu, target kegiatan dibedakan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama merupakan hasil pembelajaran dan penyelenggaraan, seperti tersedianya materi, daftar hadir, notulensi, refleksi peserta, dan ringkasan akademik. Kelompok kedua merupakan dokumen rekognisi yang hanya dapat dinyatakan telah ada setelah diterbitkan secara resmi oleh lembaga pemberi pengakuan berdasarkan kontribusi yang terlaksana. Pemisahan ini menjaga kesesuaian antara rancangan program, implementasi, dan bukti akreditasi.

Tujuan akademik perlu diterjemahkan menjadi capaian yang dapat dicermati secara nyata. Setelah kuliah umum, peserta diharapkan mampu menjelaskan hubungan antara dinamika kelembagaan Kesultanan Cirebon dan perkembangan Islam di kawasan Nusantara, serta mengenali bahwa kesimpulan sejarah dapat berbeda berdasarkan jenis bukti yang digunakan. Capaian tersebut dapat ditelusuri dari pertanyaan dalam diskusi, refleksi tertulis, dan rangkuman materi yang benar-benar dihasilkan selama kegiatan.

Relevansi kegiatan bagi program studi tidak hanya terletak pada kedatangan narasumber dari luar perguruan tinggi. Yang lebih penting ialah adanya peran akademik terukur, seperti

penyusunan kerangka diskusi, pemilihan persoalan sejarah, penyiapan pembahas, dan penyusunan rekomendasi berdasarkan sumber. Jika peran tersebut diakui secara resmi oleh Kasultanan, maka rekognisi dapat menunjukkan kepercayaan eksternal terhadap kompetensi

keilmuan prodi. Sebaliknya, bila hanya terdapat pelaksanaan kuliah umum tanpa pengakuan khusus, kegiatan dicatat terlebih dahulu sebagai implementasi kerja sama akademik.

Tujuan lanjutan diarahkan pada pembentukan kesinambungan pembelajaran. Materi dari narasumber, setelah mendapatkan izin penggunaan, dapat dijadikan bahan kajian kritis dalam mata kuliah yang relevan. Dosen dan mahasiswa dapat menelusuri kembali pertanyaan yang belum tuntas, membandingkan penjelasan dengan literatur, dan menyusun agenda penelitian sederhana. Dengan demikian, nilai kegiatan tidak berhenti pada saat berlangsungnya kuliah umum, melainkan dapat menjadi pijakan pengembangan kegiatan akademik berikutnya.

BAB II
PELAKSANAAN IMPLEMENTASI

2.1 Perencanaan dan Persiapan

Perencanaan diawali dengan perumusan pertanyaan sentral: bagaimana peranan Kesultanan Cirebon ditempatkan dalam perkembangan Islam dan pembentukan peradaban Islam di Nusantara. Pertanyaan tersebut perlu dijabarkan menjadi sejumlah cakupan pembelajaran, termasuk latar kawasan, transformasi kelembagaan, tradisi keagamaan dan kebudayaan, serta persoalan perubahan sosial. Pembatasan cakupan sangat penting supaya kuliah umum tidak menjadi penyampaian informasi yang terlalu luas dan sulit ditindaklanjuti secara ilmiah.

Panitia akademik perlu memastikan bahwa paparan dan diskusi memiliki alur yang berkesinambungan. Pembukaan dapat memberikan orientasi tentang posisi Cirebon dalam kajian sejarah Islam Nusantara, diikuti penjelasan utama narasumber mengenai dinamika kesultanan, dan dilanjutkan tanggapan akademik yang menyoroti metode serta sumber. Struktur semacam ini membuka kesempatan kepada mahasiswa untuk memahami pernyataan narasumber sebelum memasuki perdebatan interpretasi.

Penentuan narasumber tidak cukup dilakukan berdasarkan jabatan atau keterwakilan simbolik. Kesesuaian pengalaman, kewenangan dalam menyampaikan pengetahuan lembaga, dan kesiapan menyediakan bahan yang dapat dibahas merupakan pertimbangan utama. Untuk sesi pembahas, dosen yang dipilih perlu memiliki kompetensi yang sesuai agar dapat mengaitkan paparan dengan literatur historiografi dan memberikan pertanyaan yang membantu memperjelas argumen.

Dokumen TOR memiliki peranan untuk menerjemahkan gagasan akademik menjadi rancangan yang dapat dijalankan. Di dalamnya perlu dirumuskan sasaran peserta, hasil belajar yang diharapkan, jadwal, pembagian tugas, serta mekanisme pengumpulan bukti. IA berfungsi sebagai pengaturan kedua lembaga yang menjelaskan dukungan masing-masing pihak. Seluruh unsur tersebut harus diperiksa dan memperoleh persetujuan sebelum undangan resmi diterbitkan.

Persiapan dokumentasi dilakukan bersamaan dengan koordinasi teknis. Panitia dapat menyiapkan format daftar hadir, lembar notulensi, izin dokumentasi, mekanisme penyimpanan presentasi, dan format evaluasi peserta. Kebutuhan ini tidak hanya berorientasi pada audit administrasi; catatan yang baik memungkinkan program studi menilai kesesuaian antara tujuan pembelajaran dan substansi yang benar-benar disampaikan selama kegiatan.

Sebelum hari kegiatan, penanggung jawab perlu memeriksa keselarasan antara naskah undangan, susunan acara, materi dan data narasumber. Perubahan tanggal, lokasi, maupun nama pembicara harus tercermin pada berkas final. Jika kegiatan melibatkan penggunaan foto, manuskrip, atau kisah yang berasal dari sumber dengan akses terbatas, panitia perlu

menegaskan aturan kutipan serta publikasinya sehingga tidak terjadi pemanfaatan bahan tanpa izin.

Persiapan substansi harus dimulai dengan identifikasi kedalaman materi yang sesuai dengan profil peserta. Mahasiswa tingkat awal membutuhkan orientasi kronologi dan istilah dasar, sedangkan mahasiswa yang lebih lanjut dapat diarahkan pada diskusi kritik sumber dan perkembangan historiografi. Perencanaan materi yang mempertimbangkan perbedaan kesiapan peserta membantu menghindari dua ekstrem, yakni paparan yang terlalu umum dan uraian teknis yang tidak menyediakan pengantar.

Koordinasi dengan pihak Kasultanan perlu membahas batasan penggunaan identitas, narasumber, dokumen, dan sumber visual. Jika narasumber bermaksud memperlihatkan koleksi atau bahan dokumenter, panitia wajib menanyakan status izin rekaman serta penyebaran bahan. Ketentuan ini penting karena kuliah umum berpotensi direkam dan digunakan kembali sebagai sumber pembelajaran. Persetujuan yang jelas sebelum kegiatan memberi perlindungan terhadap narasumber sekaligus memudahkan penyusunan laporan dan arsip kegiatan.

Pada akhir tahap persiapan, penyelenggara perlu memeriksa kelengkapan TOR, surat undangan, kesediaan narasumber, moderator, petugas notulensi, formulir kehadiran, dan instrumen evaluasi. Kesiapan tersebut dicatat melalui daftar periksa yang dapat diaudit. Rencana yang belum mendapatkan persetujuan tidak boleh diperlakukan sebagai dokumen final. Kejelasan status berkas merupakan bagian dari tata kelola mutu yang sekaligus mempermudah pemeriksaan dokumen akreditasi.

2.2 Pelaksanaan Substantif

Pelaksanaan kuliah umum secara ideal dibangun melalui tahapan orientasi akademik, pemaparan narasumber utama, tanggapan atau pendalaman dosen, diskusi peserta, dan perumusan simpulan. Pada orientasi, moderator memperkenalkan pertanyaan inti serta batas pembahasan sehingga peserta mengetahui hubungan antara sejarah kelembagaan kesultanan dan persoalan peradaban Islam yang lebih luas. Tahapan ini tidak dimaksudkan untuk menyamakan seluruh pandangan, tetapi untuk menciptakan kerangka dialog yang jelas.

Paparan utama dapat menelusuri proses pertumbuhan masyarakat dan institusi keislaman di Cirebon dengan perhatian pada penempatan peristiwa dalam konteks waktu dan ruang. Narasumber diharapkan memberi penjelasan mengenai jenis sumber yang mendasari uraian, terutama ketika membicarakan silsilah, tradisi, atau perubahan kekuasaan. Kehati-hatian terhadap sumber penting agar peserta memahami perbedaan antara informasi yang telah didukung kajian tertulis dan penuturan yang masih memerlukan pembandingan.

Salah satu pokok yang layak dibahas ialah hubungan antara penyebaran ajaran Islam dan ekspresi kebudayaan masyarakat. Dalam sejarah Islam Nusantara, pemaknaan keagamaan sering bertemu dengan praktik sosial dan tradisi lokal yang mengalami perubahan lintas generasi. Kuliah umum dapat mendorong peserta memeriksa hubungan tersebut secara historis,

bukan sekadar mengklasifikasikan tradisi sebagai warisan yang statis atau menilai masa lalu dari ukuran yang dilepaskan dari konteksnya.

Pembahas akademik mempunyai peran untuk menjembatani penjelasan narasumber dengan perangkat keilmuan Prodi SPI. Tanggapan dapat memperjelas kronologi, menyarankan bacaan perbandingan, membedakan istilah, dan menunjukkan pertanyaan lanjutan yang layak diteliti. Tanggapan tersebut hendaknya tidak menggantikan suara narasumber, melainkan membuat forum menjadi tempat saling melengkapi perspektif secara terbuka.

Pada sesi diskusi, mahasiswa diarahkan untuk mengajukan pertanyaan yang dapat dijawab secara argumentatif. Pertanyaan yang membahas perubahan tradisi, asal sumber, kemungkinan perbedaan tafsir, dan hubungan Cirebon dengan wilayah lain akan memberikan kedalaman yang lebih besar daripada pertanyaan yang hanya meminta pengulangan isi paparan. Notulis perlu mencatat pertanyaan dan tanggapan dengan tepat, termasuk bagian yang belum memiliki jawaban yang dapat dipastikan.

Simpulan kuliah umum tidak boleh disusun sebelum substansi pertemuan benar-benar diketahui. Setelah pelaksanaan, notulensi dapat digunakan untuk mengidentifikasi pokok yang telah dijelaskan, persoalan yang masih memerlukan riset, dan kemungkinan tindak lanjut. Jika muncul perbedaan pendapat, laporan dapat mencatatnya sebagai variasi interpretasi yang perlu dikaji, bukan menampilkan salah satu pandangan seolah sudah menjadi keputusan bersama.

Dalam alur kegiatan yang direncanakan, pengantar moderator berfungsi menghubungkan tema besar dengan pertanyaan-pertanyaan yang dapat ditelaah. Moderator dapat mengawali pembahasan dengan menempatkan Cirebon dalam konteks jaringan Islam di Nusantara, kemudian mengajak narasumber memperjelas peranan kelembagaan kesultanan pada periode yang dibahas. Pola ini membantu peserta memahami kedudukan setiap informasi dalam kronologi dan menghindari pencampuran cerita dari masa yang berlainan.

Pemaparan utama idealnya memisahkan informasi yang bersifat dokumenter, ingatan kelembagaan, dan interpretasi sejarah. Pembedaan tersebut tidak dimaksudkan merendahkan nilai tradisi, melainkan menjelaskan cara membaca sumber menurut fungsi dan konteksnya. Mahasiswa dapat belajar bahwa tradisi menyimpan pemaknaan sosial dan religius, sementara pengujian tentang tanggal, tokoh, atau hubungan sebab-akibat memerlukan penelaahan yang sepadan. Keduanya dapat dipertemukan melalui dialog yang menghormati bukti dan perbedaan perspektif.

Sesi tanya jawab menjadi bagian terpenting bagi transformasi kuliah umum menjadi pembelajaran dialogis. Pertanyaan peserta dapat ditata berdasarkan isu agar tanggapan narasumber tidak terputus-putus. Notulis sebaiknya mencatat substansi pertanyaan dan jawaban, bukan hanya daftar nama penanya. Apabila muncul isu yang belum dapat dijawab, laporan hendaknya mengakuinya sebagai pertanyaan terbuka dan kemungkinan tindak lanjut, bukan membuat kesimpulan baru yang tidak pernah dikemukakan dalam forum.

2.3 Dokumentasi dan Pengendalian Evidence

Dokumentasi kuliah umum diperlakukan sebagai rekaman proses akademik dan administratif yang saling terhubung. Penyimpanan berkas dilakukan berdasarkan tahapan persiapan, pelaksanaan, verifikasi hasil, dan pengesahan laporan. Pembagian ini membantu penelaah memahami asal-usul setiap dokumen dan menghindari penempatan bahan rancangan seolah-olah merupakan bukti kegiatan yang telah terjadi.

Pada tahap persiapan, dokumen prioritas berupa MoU, IA yang ditandatangani, TOR yang disetujui, surat undangan, penugasan narasumber, dan persetujuan penggunaan identitas masing-masing lembaga. Dokumen ini menunjukkan dasar serta kewenangan pelaksanaan. Apabila ada unsur yang belum disahkan, statusnya dicatat sebagai draf dan tidak dihitung sebagai bukti final.

Pada tahap penyelenggaraan, daftar hadir menjadi sumber pemeriksaan jumlah peserta, sedangkan materi presentasi dan catatan notulensi menjadi sumber utama pembuktian substansi akademik. Foto perlu dilengkapi keterangan waktu, lokasi, dan aktivitas. Apabila tersedia rekaman audio visual, izin penggunaan dan batas penyebarannya harus diketahui, terutama ketika terdapat materi sensitif atau informasi milik pihak lain.

Penyusunan laporan akhir memerlukan prosedur pencocokan silang. Klaim bahwa suatu topik dibahas harus dapat ditelusuri ke materi atau notulensi; klaim bahwa suatu pihak hadir harus didukung daftar hadir atau keterangan lain yang sah; dan klaim bahwa publikasi telah terbit harus disertai tautan atau identitas terbitan. Dokumen yang belum ada tidak ditambahkan sekadar untuk memenuhi susunan lampiran.

Aspek rekognisi membutuhkan pembuktian yang berbeda dari penyelenggaraan. Undangan narasumber dapat menunjukkan kepercayaan kepada individu tertentu, sedangkan pengakuan tingkat program studi memerlukan redaksi dan pihak penerbit yang secara jelas menunjuk pada kompetensi atau kontribusi prodi. Karena itu, IA, sertifikat, maupun surat pengakuan perlu dianalisis sesuai isi dan kewenangan penerbitnya, bukan hanya berdasarkan judul dokumen.

Indeks evidence dapat memakai kode konsisten dan menyertakan nama berkas, tanggal penerbitan, pihak pembuat, lokasi arsip, serta status verifikasi. Pengelolaan yang tertib membantu tim akreditasi memeriksa relevansi dokumen tanpa mencampuradukkan konsep, pelaksanaan, dan keluaran final. Informasi pribadi peserta perlu dikelola secara proporsional dan tidak disebarluaskan tanpa alasan yang sah.

Dokumentasi formal memerlukan kesinambungan antara fase persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Undangan dan TOR menunjukkan rancangan kegiatan, daftar hadir menunjukkan partisipasi aktual, sedangkan materi dan notulensi membantu membuktikan substansi akademik. Foto atau video dapat memperkuat penelusuran, tetapi dokumentasi visual tidak cukup sendirian untuk menunjukkan kedalaman hasil kajian. Setiap jenis bukti perlu dikaitkan dengan klaim yang memang didukungnya.

Identitas dasar berupa judul, tanggal, lembaga penyelenggara, dan jabatan narasumber harus seragam di seluruh arsip. Ketidaksamaan tanggal pada surat dan laporan dapat menimbulkan persoalan verifikasi, terutama jika dokumen ditujukan untuk akreditasi. Oleh karena itu, penanggung jawab arsip sebaiknya melakukan pemeriksaan silang terhadap materi, dokumentasi, berita acara, serta surat pengesahan sebelum menetapkan versi final.

Pengakuan atau rekognisi eksternal harus dikelola dalam kelompok bukti tersendiri. Sebuah IA menunjukkan kesepakatan, tetapi tidak otomatis merupakan penilaian pihak mitra terhadap mutu dan kontribusi akademik. Dokumen rekognisi hanya dapat dikategorikan sebagai bukti yang telah terbit apabila benar-benar ditandatangani pejabat berwenang. Pembedaan ini menjaga kejelasan antara capaian aktual dan hasil yang masih diharapkan.

BAB III
HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Akademik

Hasil akademik yang ditargetkan ialah meningkatnya pemahaman peserta mengenai peran Kesultanan Cirebon dalam dinamika Islamisasi dan pembentukan peradaban Islam di Nusantara. Namun hasil tersebut tidak boleh disimpulkan hanya dari terselenggaranya pertemuan. Penilaian memerlukan dukungan bahan pemaparan, rangkuman diskusi, refleksi mahasiswa, atau instrumen evaluasi lain yang dapat menunjukkan hubungan antara isi kuliah umum dengan tujuan pembelajaran.

Kegiatan juga berpotensi mendorong peningkatan literasi historiografis. Melalui paparan yang memperlihatkan keberagaman sumber, mahasiswa dapat berlatih membedakan tradisi lisan, dokumen kelembagaan, hasil penelitian, dan interpretasi yang diajukan pembicara. Pembedaan tersebut memiliki implikasi pada cara menyusun argumentasi dan menilai klaim sejarah yang beredar di ruang publik.

Dalam bidang substansi, kuliah umum dapat membantu memperjelas relasi antara lembaga kesultanan dan perkembangan sosial-keagamaan masyarakat. Namun penjelasan mengenai hubungan tersebut perlu dilihat secara dinamis, termasuk kemungkinan perubahan pada periode yang berbeda. Forum diharapkan membuka pertanyaan ilmiah mengenai kontinuitas, transformasi, dan ragam pemaknaan terhadap tradisi sejarah yang telah diwariskan.

Luaran akademik yang layak dipertimbangkan mencakup ringkasan pembelajaran, daftar pertanyaan penelitian, laporan diskusi, atau naskah populer berbasis sumber. Masing-masing luaran mempunyai tahapan yang perlu dicatat, mulai dari gagasan, penyusunan, penelaahan, hingga penerbitan. Tidak ada luaran yang dinyatakan telah selesai dalam draf ini apabila berkas aktualnya belum tersedia.

Bagian hasil pada versi laporan final harus memuat temuan yang benar-benar berasal dari kegiatan, bukan sekadar uraian mengenai hasil yang mungkin terjadi. Jika kuliah umum menghasilkan pandangan yang berbeda dari dugaan awal, laporan justru perlu mencatat perubahan tersebut agar dokumen mencerminkan proses akademik. Pemisahan antara target dan capaian merupakan unsur penting kualitas pelaporan.

Berdasarkan pendekatan tersebut, mutu keluaran tidak diukur hanya dari jumlah dokumen atau peserta. Kejelasan sumber, kekuatan sintesis, keterbukaan terhadap pertanyaan, dan kemampuan memanfaatkan hasil untuk pembelajaran menjadi indikator yang lebih sesuai dengan tujuan pengembangan keilmuan sejarah peradaban Islam.

Hasil kegiatan yang layak dilaporkan seharusnya berasal dari materi dan diskusi yang benar-benar berlangsung. Misalnya, apabila narasumber menjelaskan dinamika perkembangan institusi kesultanan, laporan dapat meringkas pokok argumentasi yang diucapkan serta jenis sumber yang digunakan. Jika terdapat perbedaan pendapat,

laporan dapat mengidentifikasi ruang perbedaan tersebut secara proporsional. Penulisan semacam ini jauh lebih bernilai akademik daripada kesimpulan umum yang hanya menyatakan peserta mendapat tambahan wawasan.

Dari sisi proses belajar, kuliah umum juga berpotensi melatih kebiasaan mempertanyakan dasar sebuah keterangan. Mahasiswa dapat menghubungkan pemaparan dengan konsep perubahan sosial, pertukaran kebudayaan, dan proses Islamisasi yang mereka kenal melalui perkuliahan. Agar manfaat tersebut dapat diverifikasi, penyelenggara dapat menyimpan contoh pertanyaan, lembar refleksi, atau rangkuman hasil diskusi, dengan tetap menjaga privasi peserta jika terdapat data personal.

Produk intelektual yang dapat direncanakan meliputi ringkasan materi, catatan diskusi, daftar isu penelitian, serta bahan pengayaan pembelajaran. Namun status tiap produk harus dinyatakan secara jelas. Bahan yang masih berupa rancangan tidak disebut telah dihasilkan; tulisan yang masih menunggu penelaahan belum digolongkan sebagai publikasi. Ketepatan pencatatan status menjadi bagian dari akuntabilitas hasil akademik.

3.2 Manfaat bagi Program Studi

Program Studi SPI berpotensi memperoleh pengayaan pembelajaran melalui keterlibatan narasumber dari lingkungan Kasultanan Kacirebonan. Pengetahuan yang dipaparkan dapat digunakan sebagai bahan pembanding terhadap literatur perkuliahan, terutama pada tema sejarah Islam Nusantara dan historiografi lokal. Pemanfaatan materi perlu disesuaikan dengan hak penggunaannya serta diolah melalui perangkat pembelajaran yang relevan.

Bagi mahasiswa, kuliah umum dapat menjadi pengalaman belajar yang menunjukkan bagaimana pengetahuan sejarah dibicarakan di luar ruang kelas. Dalam kegiatan refleksi, dosen dapat meminta mahasiswa membedakan argumen, sumber pendukung, dan pertanyaan yang masih terbuka. Latihan semacam ini berpotensi memperkuat kemampuan analisis, tetapi capaian nyata tetap harus diperiksa dari hasil tugas atau respons mahasiswa.

Dari sisi pengembangan riset, forum dapat memperlihatkan tema yang membutuhkan perhatian lebih lanjut, misalnya perubahan kelembagaan, tradisi transmisi pengetahuan, atau representasi sejarah dalam kehidupan masyarakat. Tema tersebut tidak otomatis menjadi proyek yang sudah disepakati; pembentukan penelitian lanjutan memerlukan penetapan fokus, metode, mitra, jadwal dan persetujuan akses sumber.

Kegiatan juga dapat memperluas jejaring program studi dengan institusi yang memiliki pengalaman dan pengetahuan kesejarahan di luar kampus. Interaksi antarlingkungan pengetahuan dapat membantu program studi merumuskan pendekatan pengabdian atau pembelajaran berbasis sumber sejarah, selama keberlanjutan kegiatannya dirancang bersama dan tidak hanya bergantung pada agenda seremonial.

Jika Kasultanan secara resmi mempercayakan peran akademik kepada Prodi SPI, hal tersebut dapat menjadi unsur pendukung penilaian eksternal terhadap kompetensi prodi. Akan tetapi, penilaian rekognisi harus bertumpu pada substansi pengakuan resmi dan jejak pelaksanaan yang

bisa diperiksa. Kesepakatan umum untuk menyelenggarakan acara tidak dapat diperlakukan sebagai surat pengakuan yang sudah diterbitkan.

Dalam jangka lebih luas, manfaat bagi program studi terletak pada kemungkinan mengembangkan pola kerja sama yang akuntabel: pemetaan kebutuhan ilmiah, pengaturan tugas, penyelenggaraan kegiatan, evaluasi peserta, dan pengelolaan tindak lanjut. Pola ini dapat direplikasi untuk kegiatan lain, tetapi relevansinya tetap perlu dinilai berdasarkan karakter mitra dan tujuan akademik yang spesifik.

Kuliah umum dapat memperkuat keterhubungan capaian pembelajaran dengan pengalaman nyata membaca sejarah. Materi yang diberikan secara langsung oleh narasumber memperlihatkan bahwa kajian SPI mencakup penilaian bukti, penafsiran makna budaya, dan komunikasi ilmiah. Dosen selanjutnya dapat menggunakan materi yang diizinkan sebagai contoh dalam perkuliahan Historiografi, Sejarah Islam Nusantara, atau Metodologi Penelitian Sejarah, sepanjang penerapannya disesuaikan dengan tujuan mata kuliah.

Bagi kegiatan penelitian, percakapan akademik dengan lembaga kesultanan dapat membantu menemukan tema yang spesifik dan dapat dijalankan. Misalnya, mahasiswa dapat mengembangkan telaah pustaka tentang hubungan Cirebon dengan jaringan kawasan atau membandingkan representasi sejarah dalam sumber yang berbeda. Apabila penelitian memerlukan observasi dan dokumen yang dikelola pihak mitra, akses tersebut harus ditetapkan dalam persetujuan terpisah.

Dalam aspek kelembagaan, manfaat yang dicari bukan sekadar penambahan jumlah kegiatan kerja sama. Prodi perlu menunjukkan bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dilakukan dengan standar yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemampuan tersebut dapat membentuk reputasi akademik yang pada gilirannya membuka peluang pengakuan dari mitra. Tetapi klaim bahwa reputasi atau pengakuan sudah diperoleh tetap membutuhkan bukti yang berdiri sendiri.

3.3 Keterlacakan Evidence dan Status Luaran

Setiap luaran yang disebutkan dalam laporan wajib memiliki status yang dapat dibedakan secara jelas. Rencana materi, draf bahan ajar, materi yang telah disampaikan, dan publikasi final merupakan kategori yang berbeda. Penetapan status ini penting karena satu kegiatan dapat menghasilkan sejumlah bahan yang belum tentu selesai atau layak diklaim sebagai capaian akhir.

Dokumen akademik dapat ditelusuri dengan menghubungkan tujuan kuliah umum pada TOR, identitas dan penugasan narasumber, isi paparan, notulensi, serta kesimpulan yang disusun setelah kegiatan. Rantai hubungan tersebut menunjukkan apakah pelaksanaan konsisten dengan tujuan awal. Perubahan fokus selama kegiatan bukan selalu masalah, tetapi perubahan harus dicatat dan dijelaskan menurut bukti yang tersedia.

Bukti administratif dan bukti substansial juga tidak mempunyai fungsi yang sama. Daftar hadir menunjukkan partisipasi, surat undangan menunjukkan komunikasi resmi, sedangkan materi presentasi dan catatan diskusi menunjukkan isi. Foto bersama mendukung keterangan penyelenggaraan namun tidak dapat menggantikan bukti argumentasi akademik atau surat rekognisi. Pembedaan tersebut membantu penyusunan laporan yang proporsional.

Keterlacakan pengakuan menjadi perhatian khusus ketika laporan diarahkan untuk kebutuhan akreditasi. Surat pengakuan yang terbit setelah penilaian kontribusi perlu memuat nama program studi, bentuk kepercayaan atau pengakuan, ruang lingkup kegiatan, pihak berwenang, dan tanggal penerbitan. Jika tidak tersedia, bagian tersebut tetap ditulis belum ada, meskipun MoU dan kegiatan bersama sudah terdokumentasi.

Lampiran evidence disusun dengan kode yang konsisten sehingga setiap klaim dapat dirujuk ke dokumen tertentu. Apabila suatu bukti hanya disimpan secara daring, arsip mencantumkan tautan aktif yang telah diuji serta informasi pihak yang mengelola akses. Dokumen yang memuat data pribadi atau sumber terbatas harus mengikuti ketentuan perlindungan informasi.

Dalam penyelesaian laporan final, tim perlu melakukan pemeriksaan terakhir atas nama, tanggal, lokasi, nomor dokumen, serta pengesahan. Koreksi administratif dilakukan berdasarkan dokumen sumber yang sah dan dicatat apabila memengaruhi interpretasi pelaksanaan. Langkah ini menjaga laporan agar tetap dapat dipertanggungjawabkan ketika dipakai untuk evaluasi internal maupun penilaian eksternal.

Matriks bukti sebaiknya menghubungkan setiap target dengan data yang membenarkannya. Jika indikatornya partisipasi, rujukannya daftar hadir; jika indikatornya penyampaian materi, rujukannya bahan presentasi dan notulensi; jika indikatornya pengakuan mitra, rujukannya keputusan atau surat resmi yang berisi pengakuan tersebut. Dengan demikian, asesor tidak perlu menebak hubungan antara sejumlah dokumen administratif dan pernyataan capaian dalam laporan.

Pemisahan berkas menurut status juga diperlukan untuk menghindari tercampurnya draf dengan naskah yang telah disahkan. Panitia dapat menggunakan kategori rancangan, telah disetujui, telah dilaksanakan, dan terbit. Perubahan status perlu disertai tanggal serta penanggung jawab. Kedisiplinan pengarsipan mengurangi risiko penggunaan dokumen lama yang identitasnya tidak lagi cocok dengan kegiatan yang akhirnya dilaksanakan.

Apabila publikasi hasil kuliah umum direncanakan, catatan mengenai persetujuan narasumber dan hak atas materi harus menjadi bagian dari evidence. Materi sejarah yang menampilkan arsip atau benda budaya tidak secara otomatis bebas disebarluaskan. Keterlacakan izin sama pentingnya dengan keterlacakan sumber ilmiah karena menjaga hak pemilik bahan dan kehormatan hubungan kelembagaan.

BAB IV
MONITORING, EVALUASI, DAN TINDAK LANJUT

4.1 Monitoring dan Evaluasi

Monitoring implementasi perlu berlangsung sejak kegiatan direncanakan, bukan hanya setelah kuliah umum ditutup. Pemeriksaan pada tahap persiapan mencakup kesiapan materi, kejelasan penanggung jawab, persetujuan narasumber, serta kesesuaian rencana dengan MoU dan IA. Ketika salah satu unsur belum terpenuhi, panitia dapat memperbaiki rancangan sebelum undangan atau bahan publikasi disebarkan.

Pada tahap pelaksanaan, evaluasi diarahkan untuk melihat keterhubungan antara tema dan isi paparan, kejelasan penyampaian, kemampuan moderator mengelola diskusi, serta kecukupan kesempatan peserta mengajukan pertanyaan. Penilaian terhadap kualitas akademik tidak hanya menggunakan kelancaran acara sebagai ukuran, karena kegiatan yang terselenggara tanpa kendala teknis tetap dapat memiliki kekurangan pada aspek substansi.

Umpan balik peserta dapat diperoleh melalui instrumen sederhana yang menanyakan relevansi topik, kejelasan sumber, kebermanfaatan materi, dan ruang diskusi. Keterangan mengenai jumlah responden perlu disimpan agar pembaca dapat menilai jangkauan hasil evaluasi. Komentar terbuka juga bermanfaat untuk menangkap persoalan yang tidak terlihat melalui pilihan jawaban yang tertutup.

Penilaian substansial dapat dilakukan dengan menelaah ulang catatan diskusi dan materi yang diizinkan untuk ditinjau. Tim akademik memeriksa apakah istilah sejarah digunakan secara konsisten, apakah kronologi dipaparkan secara jelas, dan apakah terdapat pertanyaan peserta yang belum memperoleh jawaban memadai. Catatan semacam ini memungkinkan tindak lanjut dirumuskan dengan alasan yang konkret.

Evaluasi administrasi meliputi kesesuaian dokumen, kelengkapan daftar hadir, mutu dokumentasi, serta ketepatan pengarsipan. Ketidaksesuaian identitas atau tanggal tidak boleh diselesaikan dengan mengarang dokumen baru, tetapi melalui klarifikasi kepada pihak pembuatnya. Ketelitian administrasi penting karena laporan pelaksanaan sering digunakan sebagai dasar pengembangan kerja sama berikutnya.

Hasil monitoring dituangkan dalam matriks temuan, rekomendasi, penanggung jawab, dan status tindak lanjut. Dengan demikian, evaluasi menjadi proses perbaikan yang dapat diamati, bukan hanya pernyataan umum bahwa kegiatan berjalan baik. Dalam naskah final, setiap simpulan evaluasi harus didasarkan pada formulir, notulensi, atau dokumen lain yang benar-benar tersedia.

Monitoring sebelum kegiatan perlu meninjau kesesuaian rancangan dengan kesepakatan kedua pihak. Apabila terjadi perubahan narasumber, lokasi, atau tanggal, panitia harus memperbarui dokumen yang terdampak secara konsisten. Penilaian kelayakan substansi juga dilakukan dengan melihat hubungan antara judul, tujuan, dan topik pemaparan.

Ketepatan ini diperlukan agar kegiatan tidak hanya memenuhi prosedur administratif, tetapi menjawab kebutuhan akademik prodi.

Pada saat pelaksanaan, evaluasi mengamati keterpahaman materi, kecukupan waktu, kualitas moderasi, serta keterlibatan peserta. Instrumen sederhana dapat memadukan tanggapan berskala dan komentar terbuka. Hasil evaluasi tidak sepatutnya disimpulkan tanpa menyebut jumlah respons atau konteks pengumpulannya, sebab keterwakilan peserta ikut menentukan cara menafsirkan data.

Setelah kegiatan, tim akademik dapat menelaah materi dan notulensi untuk mengidentifikasi kekuatan pembahasan, bagian yang perlu klarifikasi, serta peluang tindak lanjut. Keputusan perbaikan dituliskan bersama penanggung jawab dan rencana waktu. Jika tidak tersedia data pendukung, laporan tidak perlu membuat angka keberhasilan atau kesimpulan kepuasan peserta yang tampak pasti.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Tindak lanjut pertama dapat diarahkan pada integrasi hasil kuliah umum ke dalam proses pembelajaran apabila materi dan hak penggunaannya memungkinkan. Prodi SPI dapat menyusun pertanyaan diskusi, ringkasan bacaan, atau tugas kritik sumber berdasarkan penjelasan yang disampaikan narasumber. Pilihan tindak lanjut harus sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah sehingga bahan kegiatan tidak sekadar diarsipkan tanpa manfaat akademik.

Tema yang muncul dalam kuliah umum dapat dipetakan sebagai calon agenda penelitian. Pemetaan dilakukan dengan mengidentifikasi persoalan yang memiliki sumber memadai, kebutuhan pendekatan metodologis, serta kemungkinan dukungan mitra. Rancangan penelitian baru hanya diteruskan setelah terdapat persetujuan dan mekanisme kerja yang sesuai, terutama bila melibatkan arsip atau wawancara di lingkungan kesultanan.

Untuk memperluas dampak, program studi dapat mempertimbangkan penulisan ringkasan akademik atau artikel populer tentang pokok kajian yang benar-benar telah disampaikan. Sebelum publikasi, tulisan perlu melalui pemeriksaan sumber dan izin pengutipan. Publikasi dilakukan sebagai hasil yang terpisah dan tidak dinyatakan sudah ada jika masih dalam tahap rencana.

Kerja sama lanjutan juga dapat dikembangkan melalui kuliah tamu berseri, diskusi sumber sejarah, atau pengabdian kepada masyarakat berbasis literasi sejarah. Namun pengembangan kegiatan tidak perlu dilakukan secara serentak. Penetapan prioritas disesuaikan dengan hasil evaluasi, kapasitas pelaksana, kebutuhan akademik, dan kesepakatan mitra sehingga keberlanjutan program dapat dijalankan secara realistis.

Program studi perlu menyimpan matriks tindak lanjut yang memuat agenda, keluaran yang diharapkan, penanggung jawab, target waktu, serta status kemajuan. Jika suatu agenda tertunda atau tidak mendapat persetujuan, hal tersebut dicatat secara terbuka.

Sistem pelacakan ini akan membantu menunjukkan kesungguhan kerja sama tanpa mengubah rencana menjadi klaim capaian.

Pada akhirnya, tindak lanjut dinilai dari kemampuannya memperbaiki proses pembelajaran dan menambah pengetahuan yang dapat diperiksa. Hubungan kelembagaan baru memiliki dampak akademik yang bermakna apabila didukung pekerjaan substantif, dokumentasi memadai, serta penilaian yang konsisten atas manfaat dan keterbatasannya.

Tindak lanjut yang paling dekat dengan kegiatan ialah pemanfaatan materi berizin untuk penguatan pembelajaran. Program studi dapat menyusun pertanyaan analitis, bahan pembanding, atau tugas refleksi yang membantu mahasiswa menghubungkan paparan narasumber dengan literatur. Pengembangan ini harus memperhatikan kecukupan sumber dan memastikan pendapat yang muncul dalam forum tidak digunakan sebagai satu-satunya dasar kesimpulan sejarah.

Pada tingkat penelitian, agenda lanjutan sebaiknya diawali penentuan fokus, kebutuhan data, dan kapasitas tim. Topik terlalu luas tidak mudah dikerjakan dan dapat mengaburkan keluaran. Kerja sama yang memerlukan arsip, wawancara, atau akses lokasi memerlukan kesepakatan tersendiri dengan pihak terkait. Kesadaran atas ruang kewenangan menjaga agar MoU tidak ditafsirkan sebagai izin umum atas seluruh materi sejarah.

Untuk menilai keberlanjutan kerja sama, program studi dapat mengelola matriks tindak lanjut yang mencatat rekomendasi, keputusan, penanggung jawab, dan kemajuan pekerjaan. Tindakan yang belum dimulai tetap dicatat sebagai rencana. Apabila ada perkembangan, laporan berikutnya harus memperlihatkan produk dan tanggal yang dapat diperiksa. Pendekatan ini membuat siklus perbaikan terdokumentasi secara berkelanjutan.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kuliah umum bertema peranan Kesultanan Cirebon dalam perkembangan Islam dan pembentukan peradaban Islam di Nusantara memiliki dasar relevansi yang kuat bagi Program Studi Sejarah Peradaban Islam. Dalam rancangan ini, pokok pembahasan diarahkan untuk mempertemukan kajian sejarah kelembagaan, dinamika penyebaran Islam, dan perubahan tradisi kebudayaan. Penyelenggaraan kuliah umum diharapkan memberi ruang pembelajaran yang lebih kontekstual sekaligus memperkenalkan kehati-hatian metodologis dalam menyusun interpretasi sejarah.

Nota Kesepahaman tahun 2025 menyediakan dasar umum untuk penyelenggaraan kuliah umum bersama, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa kegiatan telah berlangsung atau bahwa program studi sudah memperoleh pengakuan eksternal. Untuk itu diperlukan IA yang disetujui, penugasan yang sah, bahan pelaksanaan, notulensi, daftar hadir, serta laporan hasil yang dapat diperiksa. Ketentuan mengenai bukti ini sekaligus membantu menjaga ketepatan penilaian kerja sama akademik.

Potensi manfaat akademik meliputi pengayaan bahan ajar, penguatan literasi historiografi, pembukaan pertanyaan riset lanjutan, dan pengembangan jejaring dengan lembaga kesultanan. Manfaat tersebut bersifat sasaran sampai terdapat data pelaksanaan yang menegaskannya. Laporan final hendaknya memisahkan hasil yang sudah terukur dengan agenda yang masih harus dijalankan, sehingga bagian kesimpulan tidak melampaui ruang lingkup bukti yang tersedia.

Rekognisi program studi hanya dapat dinyatakan diperoleh apabila Kasultanan Kacirebonan secara resmi mengakui kontribusi atau kompetensi akademik Prodi SPI sesuai proses dan kewenangan yang berlaku. Dokumen konsep pengakuan, IA, maupun sertifikat yang belum disahkan tidak dapat menggantikan keputusan pihak pemberi rekognisi. Hal ini penting terutama apabila laporan akan disertakan dalam instrumen penilaian akreditasi.

Dengan kerangka pelaksanaan, pengendalian bukti, evaluasi, dan tindak lanjut yang sistematis, kuliah umum berpotensi berkembang menjadi kerja sama akademik yang menghasilkan nilai pembelajaran nyata. Penyempurnaan naskah ini perlu dilakukan setelah tanggal pelaksanaan, nama narasumber, ringkasan materi, respons peserta, serta keluaran terverifikasi tersedia dan mendapatkan pengesahan yang diperlukan.

Rancangan kuliah umum ini memperlihatkan adanya hubungan substantif antara kajian Sejarah Peradaban Islam dan pengetahuan tentang Kesultanan Cirebon. Tema yang dipilih dapat mempertemukan pembacaan kronologi, dinamika keagamaan, sejarah kelembagaan, dan pembentukan kebudayaan Islam dalam ruang ilmiah yang sama. Nilainya bagi mahasiswa terutama terdapat pada kesempatan menyaksikan penggunaan sumber, argumentasi, dan dialog akademik secara langsung.

Landasan MoU memberikan kerangka legal kelembagaan bagi perencanaan kegiatan, sedangkan bukti implementasi harus berasal dari pelaksanaan nyata. Karena itu, laporan versi final wajib didasarkan pada undangan, jadwal, materi, notulensi, daftar hadir, dokumentasi, dan pengesahan yang dapat diverifikasi. Kesimpulan tentang hasil dan manfaat hanya dapat dipastikan sesuai data yang benar-benar dikumpulkan.

Rekognisi program studi merupakan dimensi yang berkaitan tetapi tidak identik dengan pelaksanaan kuliah umum. Pengakuan terhadap kepakaran atau kontribusi Prodi SPI perlu dinyatakan secara khusus oleh Kasultanan Kacirebonan melalui dokumen yang sah. Sampai terdapat keputusan tersebut, nama rekognisi ditempatkan sebagai usulan dan bukan capaian. Dengan pemisahan ini, paket dokumen dapat mendukung persiapan kegiatan sekaligus mempertahankan ketelitian akademik dan administratif.